

KOPERASI DAN UMKM

Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia

Hakim Muttaqim, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev., AFA.



KOPERASI DAN UMKM

Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia

Hakim Muttaqim, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev., AFA.



KOPERASI DAN UMKM

Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia

Penulis:

Hakim Muttaqim, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev., AFA.

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 192
ISBN : 978-634-7021-63-2
Terbit Pada : Agustus 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "**Koperasi dan UMKM: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia**" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sebuah karya yang berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM memegang peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga penting untuk memahami segala aspek yang menyangkut pengelolaan, regulasi, tantangan, dan peluang di dalamnya.

Dalam upaya memberikan pemahaman menyeluruh, buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis dan lengkap. Mulai dari latar belakang dan tujuan penulisan yang menjelaskan urgensi koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia, hingga pembahasan mendalam tentang konsep dasar dan nilai-nilai yang melandasi koperasi serta klasifikasi UMKM berdasarkan karakteristik usahanya. Pengetahuan ini menjadi landasan penting sebelum menggali sejarah panjang perkembangan koperasi dan UMKM yang telah melewati berbagai masa, mulai dari kemunculan pertama di dunia dan Indonesia, perjalanan sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi, sampai kondisi terkini yang penuh tantangan namun sarat peluang.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi fokus utama karena kerangka hukum serta program pendukung sangat menentukan keberhasilan pengembangan koperasi dan UMKM. Buku ini membahas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, kebijakan nasional UMKM, peran kementerian terkait, serta dukungan pemerintah daerah yang terintegrasi melalui program-program inisiatif strategis. Dengan pemahaman regulasi ini,

diharapkan pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan maksimal, sementara pemerintah dapat mengoptimalkan peran pengawasan dan fasilitasi.

Selain itu, manajemen usaha koperasi dan UMKM dibahas secara rinci mulai dari perencanaan bisnis yang matang, pengorganisasian dan kepemimpinan yang efektif, pengelolaan keuangan dan pembukuan yang transparan, hingga evaluasi dan pengawasan internal untuk menjaga kinerja usaha agar tetap berkelanjutan. Topik ini penting untuk membekali pelaku usaha agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing.

Akses terhadap permodalan dan pembiayaan menjadi salah satu tantangan klasik bagi koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, buku ini menguraikan berbagai sumber modal, baik internal maupun eksternal, serta cara mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal maupun nonformal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir. Penjelasan ini menjadi panduan praktis agar pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dengan lebih mudah dan terstruktur.

Era digital yang terus berkembang pesat membawa dampak besar bagi cara usaha dijalankan. Buku ini juga membahas transformasi digital yang dialami koperasi dan UMKM, pemanfaatan teknologi informasi dan platform *e-commerce*, pemasaran digital melalui media sosial, hingga inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Transformasi ini menjadi kunci agar koperasi dan UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan bersaing di pasar global yang semakin terbuka.

Pemberdayaan sumber daya manusia tidak kalah pentingnya dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Melalui pelatihan, inkubasi bisnis, pendampingan usaha, serta peran aktif perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, kemampuan pelaku usaha dapat ditingkatkan sehingga mampu menghadapi dinamika pasar dan teknologi. Buku ini menjelaskan berbagai program pemberdayaan yang telah dan dapat dilakukan untuk menguatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini.

Peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal juga menjadi sorotan khusus. Kedua sektor ini tidak hanya

menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat komunitas dan memberdayakan masyarakat di berbagai daerah. Buku ini menyajikan studi kasus keberhasilan di beberapa wilayah sebagai inspirasi, sekaligus mengupas strategi kolaborasi antara koperasi, UMKM, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Terakhir, buku ini membahas tantangan yang dihadapi koperasi dan UMKM di era globalisasi, termasuk persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam konteks ini, strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing menjadi sangat penting. Peran generasi muda sebagai penerus dan inovator juga diangkat sebagai kunci untuk menjamin keberlanjutan koperasi dan UMKM. Dengan roadmap dan rekomendasi pengembangan berkelanjutan, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis demi kemajuan sektor ini di masa depan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan koperasi dan UMKM tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga nilai gotong royong dan kemandirian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, referensi ilmiah, dan panduan praktis bagi pelaku usaha, akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM yang lebih maju dan berdaya saing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Bireuen, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pentingnya Koperasi dan UMKM di Indonesia	1
B. Memahami dan Mengembangkan Koperasi dan UMKM: Pilar Perekonomian Nasional Indonesia.....	5
C. Manfaat Membaca Buku Ini: Panduan Komprehensif untuk Koperasi dan UMKM di Indonesia	6
BAB 2 TEORI KOPERASI DAN UMKM	8
A. Pengertian Koperasi.....	8
B. Pengertian UMKM.....	9
C. Prinsip dan Nilai Dasar Koperasi	11
D. Kategori dan Klasifikasi UMKM.....	13
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI INDONESIA	19
A. Sejarah Koperasi di Dunia dan Indonesia	19
B. Perjalanan UMKM dari Masa ke Masa.....	25
C. Peran Strategis di Era Orde Baru dan Reformasi	30
D. Kondisi Terkini Koperasi dan UMKM.....	36
BAB 4 REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	42
A. Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi	42
B. Kebijakan UMKM Nasional.....	47
E. Peran Kementerian Koperasi dan UKM	52
F. Dukungan Pemerintah Daerah dan Program Inisiatif.....	55
BAB 5 MANAJEMEN USAHA KOPERASI DAN UMKM	60
A. Perencanaan Bisnis.....	60
B. Organisasi dan Kepemimpinan	66
C. Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan.....	71
D. Evaluasi dan Pengawasan Internal.....	76
BAB 6 PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN	82
A. Sumber Modal Internal dan Eksternal.....	82
B. Akses UMKM terhadap Lembaga Keuangan	87

C.	Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir.....	92
D.	Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam	97
BAB 7	DIGITALISASI DAN INOVASI.....	103
A.	Transformasi Digital UMKM dan Koperasi.....	103
B.	Pemanfaatan Teknologi dan <i>E-commerce</i>	108
D.	Inovasi Produk dan Layanan Berbasis Teknologi.....	118
BAB 8	PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN	124
A.	Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	124
E.	Program Pelatihan dan Inkubasi Bisnis.....	130
F.	Pendampingan Usaha dan Mentoring.....	135
G.	Peran Perguruan Tinggi dan LSM dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.....	141
BAB 9	KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL.....	146
A.	Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Komunitas	146
B.	UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.....	152
C.	Studi Kasus Keberhasilan di Berbagai Wilayah.....	158
D.	Strategi Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta.....	161
BAB 10	TANTANGAN DAN STRATEGI MASA DEPAN.....	167
A.	Tantangan Globalisasi dan Persaingan Pasar.....	167
B.	Strategi Penguatan Kelembagaan dan Daya Saing.....	172
C.	Peran Generasi Muda dalam Koperasi dan UMKM.....	177
D.	Roadmap dan Rekomendasi Pengembangan Berkelanjutan	181
	DAFTAR PUSTAKA.....	185
	PROFIL PENULIS.....	192

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pentingnya Koperasi dan UMKM di Indonesia

Perekonomian Indonesia merupakan struktur yang sangat kompleks, dinamis, dan sangat bergantung pada beragam aktor usaha di berbagai sektor. Di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif serta tantangan domestik yang terus berubah, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Koperasi dan UMKM bukan hanya entitas ekonomi semata, tetapi juga manifestasi dari semangat kemandirian, gotong royong, dan keadilan sosial yang telah menjadi bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak lama.

Dalam konteks ini, koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun sangat signifikan, yakni mencapai lebih dari 60%. Di sisi lain, koperasi sebagai badan usaha yang berbasis anggota dan dijalankan atas prinsip kekeluargaan, memberikan kontribusi penting dalam mendorong demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Peran koperasi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, karena mampu membangun kesadaran kolektif, solidaritas antaranggota, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

Namun demikian, di tengah segala kontribusinya, koperasi dan UMKM juga menghadapi beragam tantangan yang tidak ringan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Banyak koperasi dan UMKM kesulitan mendapatkan

pembiayaan yang layak, akses pasar yang luas, teknologi yang relevan, serta sumber daya manusia yang terampil. Perbankan konvensional masih cenderung enggan memberikan kredit kepada sektor ini karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memiliki jaminan yang memadai. Di sisi lain, literasi keuangan pelaku UMKM juga masih rendah, sehingga sulit untuk mengelola pembiayaan secara efisien. Demikian pula, masih banyak koperasi yang dikelola secara tradisional dan kurang transparan, sehingga kehilangan kepercayaan dari anggota maupun pihak luar.

Tantangan lain yang mengemuka adalah masalah kapasitas dan skala usaha. Sebagian besar UMKM masih berada pada tahap usaha subsisten atau skala kecil, yang belum memiliki sistem manajemen modern, kemampuan produksi massal, ataupun jaringan distribusi yang luas. Akibatnya, produk UMKM sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Rendahnya inovasi dan penggunaan teknologi juga membuat UMKM kerap tertinggal dibandingkan pelaku usaha besar. Sementara itu, koperasi juga kerap menghadapi masalah kelembagaan seperti konflik internal, lemahnya kepemimpinan, dan kurangnya kaderisasi.

Di tengah tantangan tersebut, muncul pula berbagai peluang baru, terutama yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital. Transformasi digital telah menjadi *game changer* dalam dunia usaha, termasuk bagi koperasi dan UMKM. Kehadiran *e-commerce*, media sosial, dompet digital, sistem pembayaran elektronik, hingga platform pemasaran daring memberikan harapan besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing. Kini, seorang pelaku UMKM di desa dapat memasarkan produknya ke pasar nasional bahkan internasional hanya dengan menggunakan gawai dan koneksi internet. Digitalisasi memungkinkan proses usaha menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Untuk koperasi, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem akuntansi, pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat hubungan antaranggota secara daring.

Namun, transformasi digital juga membawa tantangan tersendiri. Ketimpangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil, serta kurangnya pelatihan menjadi hambatan dalam proses adaptasi teknologi. Tidak semua pelaku

UMKM atau pengelola koperasi siap dengan perubahan ini. Oleh karena itu, upaya digitalisasi perlu disertai dengan pendidikan, pendampingan, serta regulasi yang kondusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional. Berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan, mulai dari pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi produk, hingga program digitalisasi UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berupaya melakukan reformasi kelembagaan, mendorong koperasi modern, serta membentuk pusat-pusat inkubasi dan kemitraan usaha. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan implementasi yang konsisten di tingkat daerah. Selain itu, perlu pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, mengingat keragaman karakteristik UMKM dan koperasi di setiap wilayah di Indonesia.

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, koperasi dan UMKM juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Mereka tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi pengangguran, meningkatkan inklusi sosial, dan mendorong kewirausahaan berbasis komunitas. Banyak koperasi dan UMKM yang lahir dari inisiatif lokal, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, koperasi wanita, dan koperasi sekolah, yang semuanya berakar dari kebutuhan riil masyarakat. Dalam hal ini, koperasi dan UMKM menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dari bawah ke atas (*bottom-up development*), yang sangat sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pada masa krisis, seperti krisis moneter 1998 maupun pandemi COVID-19, koperasi dan UMKM terbukti lebih tahan banting dibandingkan sektor usaha besar. Ketika banyak korporasi besar melakukan pemutusan hubungan kerja, UMKM menjadi penyelamat ekonomi keluarga. Ketika akses barang menjadi sulit, koperasi konsumen menjadi alternatif distribusi kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, serta peran sebagai penyangga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun demikian, untuk menjadikan koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional, diperlukan strategi yang lebih terarah dan berkesinambungan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM. Pendekatan pengembangan koperasi dan UMKM tidak boleh lagi bersifat karitatif atau sesaat, tetapi harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka panjang. Diperlukan pula keberpihakan dalam kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam hal fiskal, pengadaan barang/jasa, dan pembukaan akses pasar domestik maupun internasional.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang manajerial atau tidak memahami prinsip dasar kewirausahaan, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, hukum usaha, hingga perizinan. Begitu juga dengan koperasi, banyak yang tidak memahami prinsip koperasi secara menyeluruh, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan cenderung seperti perusahaan biasa dan kehilangan identitas sebagai organisasi berbasis anggota. Oleh karena itu, pendidikan koperasi dan pelatihan kewirausahaan harus diperkuat sejak jenjang sekolah hingga pendidikan tinggi. Perlu dibangun pula budaya kewirausahaan dan literasi koperasi di masyarakat, semakin banyak orang memahami dan tertarik bergabung dalam ekosistem koperasi dan UMKM.

Di sisi lain, regenerasi dalam kepemimpinan koperasi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak koperasi yang dikelola oleh orang-orang yang sama selama bertahun-tahun, tanpa ada mekanisme kaderisasi yang baik. Hal ini menyebabkan stagnasi dan ketergantungan pada satu figur tertentu. Untuk itu, dibutuhkan program kaderisasi pengurus koperasi yang sistematis dan berbasis kompetensi, agar koperasi dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif antara generasi muda dan senior dalam pengelolaan koperasi bisa menjadi solusi untuk menjembatani nilai-nilai lama dengan semangat baru.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkaya literatur mengenai koperasi dan UMKM, khususnya

dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat beragam. Buku ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman konseptual tentang koperasi dan UMKM, tetapi juga ingin mengangkat praktik-praktik terbaik, tantangan nyata, serta peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang ingin memahami secara mendalam mengenai strategi pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

Dengan menyatukan perspektif teoritis dan praktis, buku ini ingin menunjukkan bahwa koperasi dan UMKM bukanlah entitas pinggiran dalam perekonomian nasional, tetapi justru merupakan pusat dari dinamika ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan kebijakan yang berpihak, koperasi dan UMKM dapat menjadi kekuatan transformasional dalam mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di era global.

B. Memahami dan Mengembangkan Koperasi dan UMKM: Pilar Perekonomian Nasional Indonesia

Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami secara mendalam konsep, peran strategis, tantangan, serta berbagai strategi pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

Melalui pendekatan yang sistematis, buku ini memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai pengertian, prinsip dasar, karakteristik, sejarah perkembangan, dan landasan hukum koperasi serta UMKM sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan. Pembaca akan diajak untuk memahami esensi dan pondasi operasional keduanya.

Lebih lanjut, buku ini menggambarkan peran strategis koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, menganalisis kontribusi nyata mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan

kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peran krusial dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tidak hanya itu, buku ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM. Berbagai hambatan, mulai dari aspek kelembagaan, pendanaan, sumber daya manusia, regulasi, hingga persoalan digitalisasi dan akses pasar, diidentifikasi secara cermat. Pemahaman atas tantangan ini diharapkan dapat membantu pembaca merumuskan solusi yang tepat dan relevan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, buku ini menawarkan strategi penguatan dan pengembangan yang praktis dan dapat diterapkan. Strategi ini mencakup aspek manajemen, pendanaan, teknologi, kemitraan, hingga pembinaan dan pemberdayaan komunitas, menjadi panduan bagi pelaku, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan.

Dirancang sebagai bahan ajar dan referensi yang relevan, buku ini sangat cocok bagi mahasiswa, dosen, pelatih kewirausahaan, serta peserta pendidikan dan pelatihan yang ingin mendalami tema koperasi dan UMKM. Struktur yang sistematis dan isi yang aplikatif diharapkan dapat mendukung pembelajaran di bidang ekonomi kerakyatan.

Beyond akademik, buku ini mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, membangkitkan semangat kolektif untuk mendukung penguatan koperasi dan UMKM. Harapannya, buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

Pada akhirnya, dengan mengedepankan inklusivitas, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, buku ini secara langsung mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kerja layak bagi semua.

C. Manfaat Membaca Buku Ini: Panduan Komprehensif untuk Koperasi dan UMKM di Indonesia

Buku ini dirancang untuk memberikan manfaat yang luas, menggabungkan kedalaman teoritis dengan relevansi praktis, dan

disajikan secara sistematis dengan konteks Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi rujukan esensial bagi siapa saja yang tertarik dengan isu koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembaca akan mendapatkan pengetahuan dasar dan konseptual yang kuat, memahami definisi, prinsip, karakteristik, serta hubungan erat antara koperasi dan UMKM, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman tentang peran strategis keduanya dalam sistem ekonomi nasional.

Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya ekonomi kerakyatan. Melalui penjelasan dan ilustrasi peran koperasi dan UMKM dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, pembaca diajak untuk lebih mengapresiasi pentingnya memperkuat sektor ekonomi rakyat demi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan inklusif.

Bagi para pelaku koperasi dan UMKM, buku ini berfungsi sebagai panduan praktis yang memberikan gambaran nyata mengenai pengelolaan yang efektif. Pelaku usaha, pengurus koperasi, atau calon wirausahawan dapat memanfaatkan buku ini sebagai referensi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.

Sebagai sumber rujukan akademik, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang ekonomi, bisnis, kewirausahaan, dan pembangunan masyarakat. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, materi kuliah, atau acuan dalam penulisan karya ilmiah.

Lebih jauh, buku ini dapat membantu pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merancang program pemberdayaan dan regulasi yang berpihak pada koperasi dan UMKM, membantu merumuskan strategi penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Terakhir, buku ini mendorong kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan dengan menunjukkan potensi besar koperasi dan UMKM dalam konteks kemitraan lintas sektor. Selain itu, dengan menyajikan kisah sukses dan strategi pengembangan, buku ini juga memberikan inspirasi dan motivasi berwirausaha, khususnya bagi generasi muda, untuk terjun ke dunia kewirausahaan berbasis nilai kebersamaan, keberlanjutan, dan inovasi.

BAB 2

TEORI KOPERASI DAN UMKM

A. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya mereka melalui suatu perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat secara umum.

Di Indonesia, pengertian koperasi secara legal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Definisi ini menekankan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang bertujuan membangun solidaritas dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Ia lahir dari kebutuhan kolektif untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil yang selama ini sering terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Melalui koperasi, para anggotanya dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, dan pelatihan, yang sulit diakses secara individu.

Dalam praktiknya, koperasi dapat berbentuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produsen, koperasi jasa, hingga koperasi serba usaha. Bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya, namun semuanya tetap berpijak pada nilai-nilai dasar koperasi seperti partisipasi sukarela, pengelolaan demokratis, dan distribusi manfaat yang adil.

Di tengah perubahan zaman dan tantangan ekonomi global, koperasi tetap relevan sebagai model alternatif ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata pada akumulasi keuntungan.

B. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. UMKM adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil sampai menengah, baik dari sisi modal, omzet, maupun jumlah tenaga kerja yang dilibatkan.

Secara yuridis, definisi UMKM di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut, UMKM diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja. Berikut adalah klasifikasinya:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar, dengan kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta atau memiliki omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar, dengan kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia tergolong dalam kategori UMKM, dan sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Artinya, keberlangsungan sektor UMKM sangat menentukan stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, manufaktur skala kecil, hingga jasa. Fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi menjadi kekuatan UMKM dalam menghadapi perubahan ekonomi. Mereka mampu bertahan bahkan di tengah krisis ekonomi global, seperti yang terlihat saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19.

Namun, UMKM juga menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pasar dan teknologi, kurangnya pelatihan manajerial, serta keterbatasan dalam legalitas usaha dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, baik melalui kebijakan fiskal, regulasi yang berpihak, hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti pelatihan, pembiayaan mikro, dan inkubasi bisnis.

UMKM juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis lokal (local economic development), karena sering kali berakar kuat dalam komunitas dan memanfaatkan sumber daya lokal. Karakter ini menjadikan UMKM berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Prinsip dan Nilai Dasar Koperasi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat tidak hanya berdiri atas dasar kepentingan ekonomi semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Inilah yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya. Prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi menjadi fondasi moral dan operasional yang membimbing aktivitas organisasi ini agar tetap setia pada tujuannya, yakni kesejahteraan bersama.

1. Nilai Dasar Koperasi

Menurut International Co-operative Alliance (ICA), koperasi dibangun atas nilai-nilai berikut:

a. Kemandirian (*Self-help*) dan Tanggung Jawab Diri (*Self-responsibility*)

Anggota koperasi harus aktif dalam mengelola dan mengambil tanggung jawab atas keberlangsungan koperasi. Koperasi tidak bergantung pada pihak luar, tetapi pada kekuatan dan partisipasi anggotanya sendiri.

b. Demokrasi

Koperasi dikelola secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memperhitungkan besarnya modal yang ditanam. Prinsip ini menciptakan keadilan dalam pengambilan keputusan.

c. Kesetaraan dan Persamaan (*Equality and Equity*)

Koperasi menjunjung tinggi kesetaraan di antara para anggotanya. Setiap anggota diperlakukan setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam proses organisasi.

d. Solidaritas

Koperasi mendorong kerja sama yang solid antarsesama anggota dalam mencapai tujuan bersama. Ikatan sosial dan rasa kebersamaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial.

e. Kejujuran, Keterbukaan, dan Tanggung Jawab Sosial

Nilai moral dan etika ini menjadi dasar operasional koperasi. Kejujuran dan transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan di antara anggota dan pengurus.

2. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah garis panduan operasional yang digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut. ICA merumuskan tujuh prinsip koperasi internasional yang juga diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia:

a. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka (*Voluntary and Open Membership*)

Koperasi bersifat inklusif, terbuka untuk siapa saja yang mampu memenuhi persyaratan keanggotaan tanpa diskriminasi. Tidak ada paksaan dalam bergabung atau keluar dari koperasi.

b. Kendali Demokratis oleh Anggota (*Democratic Member Control*)

Koperasi dikelola oleh anggotanya secara demokratis. Setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan, tanpa memperhatikan jumlah modal yang disetorkan.

c. Partisipasi Ekonomi Anggota (*Member Economic Participation*)

Anggota secara adil berkontribusi dalam modal koperasi dan mengontrol penggunaannya. Surplus koperasi dibagikan kepada anggota secara proporsional sesuai transaksi mereka, bukan berdasarkan besarnya modal.

d. Otonomi dan Kebebasan (*Autonomy and Independence*)

Koperasi adalah organisasi otonom yang dikendalikan oleh anggotanya. Jika menjalin kemitraan atau menerima bantuan dari luar, hal itu tidak boleh mengurangi kemandirian dan prinsip dasar koperasi.

e. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi (*Education, Training, and Information*)

Koperasi berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam koperasi. Ini juga penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi.

f. Kerja Sama antar Koperasi (*Cooperation among Cooperatives*)

Untuk memperkuat gerakan koperasi, satu koperasi harus bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kolaborasi ini memperkuat jejaring dan meningkatkan kekuatan ekonomi kolektif.

- g. Kepedulian terhadap Komunitas (*Concern for Community*)
Koperasi harus berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan komunitas tempatnya beroperasi. Kegiatan koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga kebermanfaatan sosial dan lingkungan.

3. Penerapan Prinsip dan Nilai dalam Praktik

Dalam praktik sehari-hari, prinsip dan nilai koperasi tersebut tercermin dalam pola kepemimpinan yang kolektif, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan orientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata laba. Misalnya, dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan (sisa hasil usaha) dibagikan kembali kepada anggota berdasarkan besarnya transaksi pinjam simpan, bukan besarnya modal.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga mendorong pembentukan koperasi yang adil gender, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Dengan prinsip ini, koperasi menjadi institusi ekonomi yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial yang inklusif.

D. Kategori dan Klasifikasi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menjadi tumpuan penghidupan jutaan rakyat, tetapi juga menjadi garda depan dalam menyerap tenaga kerja, mendorong inovasi lokal, serta mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata. Untuk mengoptimalkan pengembangan sektor UMKM, sangat penting memahami bagaimana kategori dan klasifikasinya ditetapkan, baik secara formal oleh regulasi negara maupun secara praktis di lapangan.

1. Pengertian dan Landasan Hukum Klasifikasi UMKM

Landasan hukum utama yang menjadi acuan dalam klasifikasi UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini tidak hanya memberikan pengertian dasar UMKM, tetapi juga menyusun klasifikasi berdasarkan dua kriteria utama:

- a. Kekayaan bersih (aset) – tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Hasil penjualan tahunan (omzet) – sebagai indikator skala ekonomi dari unit usaha tersebut.

Klasifikasi ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah, seperti bantuan permodalan, pelatihan, insentif pajak, dan akses pasar, bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing kategori usaha.

2. Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Berdasarkan ketentuan pasal 6 dalam UU tersebut, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

a. Usaha Mikro

- 1) Kriteria Aset (modal bersih): Maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Kriteria Omzet Tahunan: Maksimal Rp300 juta.

Ciri khas dari usaha mikro adalah usaha ini umumnya bersifat informal, dikelola secara perorangan atau keluarga, dengan lokasi usaha yang fleksibel (di rumah, kaki lima, atau tempat terbuka lainnya). Produk yang dihasilkan cenderung tradisional dan lokal. Meskipun berkontribusi besar terhadap lapangan kerja, usaha mikro sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.

Contoh usaha mikro antara lain: pedagang gorengan, penjual pulsa keliling, tukang cukur, pedagang asongan, warung sembako rumahan, dan pengrajin anyaman bambu.

b. Usaha Kecil

- 1) Kriteria Aset: Lebih dari Rp50 juta sampai maksimal Rp500 juta.
- 2) Kriteria Omzet Tahunan: Lebih dari Rp300 juta sampai maksimal Rp2,5 miliar.

Usaha kecil memiliki struktur usaha yang lebih terorganisir dibandingkan usaha mikro. Mereka umumnya memiliki legalitas usaha (SIUP, NPWP, atau IUMK), tenaga kerja tetap, dan pola usaha yang lebih stabil. Usaha kecil dapat

memanfaatkan sistem distribusi yang lebih luas, memiliki akses ke lembaga keuangan formal, dan kadang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Contoh usaha kecil: toko bahan bangunan, percetakan kecil, usaha katering dengan 10-20 karyawan, bengkel sepeda motor, dan produsen pakaian lokal.

c. Usaha Menengah

1) Kriteria Aset: Lebih dari Rp500 juta sampai maksimal Rp10 miliar.

2) Kriteria Omzet Tahunan: Lebih dari Rp2,5 miliar sampai maksimal Rp50 miliar.

Usaha menengah menempati posisi penting sebagai jembatan antara usaha kecil dan usaha besar (korporasi). Mereka umumnya telah memiliki sistem manajemen yang cukup modern, menggunakan teknologi produksi yang lebih baik, dan berorientasi ekspansi. Beberapa usaha menengah bahkan telah memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan besar, baik sebagai pemasok (supplier) maupun sebagai distributor.

Contoh usaha menengah: industri pengolahan makanan skala regional, manufaktur komponen otomotif, perusahaan jasa konstruksi lokal, dan perusahaan pengolahan hasil pertanian.

3. Klasifikasi Tambahan Berdasarkan Sektor dan Aktivitas

Selain berdasarkan ukuran usaha, UMKM juga diklasifikasikan menurut sektor usaha atau jenis aktivitas ekonomi yang dijalankan. Klasifikasi ini penting dalam perumusan program pemberdayaan berbasis sektor.

a. Sektor Pertanian dan Perikanan

Meliputi petani kecil, nelayan, pembudidaya ikan, peternak rakyat, dan usaha olahan hasil pertanian seperti keripik singkong, ikan asin, dan pupuk organik. Tantangan utama mereka adalah ketergantungan pada musim, akses teknologi, dan stabilitas harga.

b. Sektor Perdagangan

UMKM di sektor ini mencakup pedagang kaki lima, warung, toko kelontong, toko online kecil, dan usaha grosir kecil. Dinamika permintaan dan persaingan harga menjadi tantangan besar.

c. Sektor Industri Pengolahan

Termasuk pengrajin batik, produsen makanan ringan, industri mebel, konveksi, dan usaha sablon. Mereka memiliki nilai tambah tinggi namun membutuhkan modal lebih besar dan manajemen produksi yang efisien.

d. Sektor Jasa

Termasuk usaha salon, bengkel, fotokopi, laundry, travel lokal, dan UMKM berbasis digital (*freelancer, content creator*). Sektor jasa berkembang pesat di era digital.

4. Klasifikasi Berdasarkan Formalitas dan Legalitas

a. UMKM Formal

Usaha yang memiliki legalitas lengkap: Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, izin usaha, dan mencatat laporan keuangan secara rutin. Biasanya lebih mudah mendapat akses pembiayaan bank.

b. UMKM Informal

Usaha yang berjalan tanpa legalitas resmi. Meski berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal, mereka sulit diakses oleh kebijakan formal pemerintah. Pembinaan UMKM informal menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan ekonomi inklusif.

5. Klasifikasi Berdasarkan Tahap Perkembangan Usaha

a. UMKM Rintisan (*Start-up*)

Usaha yang baru berdiri dan masih mencari model bisnis yang cocok. Fokus pada pengembangan produk, validasi pasar, dan strategi bertahan hidup.

b. UMKM Berkembang

Telah melewati fase awal dan mulai menunjukkan kestabilan pendapatan. Fokus pada ekspansi, pembenahan manajemen, dan peningkatan kualitas produk.

c. **UMKM Naik Kelas**

UMKM yang mulai menjangkau pasar nasional atau bahkan ekspor. Mereka siap bermitra dengan perusahaan besar dan mengikuti proses standarisasi nasional atau internasional.

6. Tantangan dan Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM Berdasarkan Klasifikasi

Setiap klasifikasi UMKM menghadapi tantangan spesifik. Oleh karena itu, strategi peningkatannya pun harus disesuaikan:

a. Untuk usaha mikro

Fokus pada peningkatan literasi keuangan, pendampingan legalitas usaha, akses pembiayaan ultra mikro (UMi), dan pelatihan dasar wirausaha.

b. Untuk usaha kecil

Perlu didorong dalam hal penguatan sistem manajemen usaha, digitalisasi, perluasan pasar, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.

c. Untuk usaha menengah

Strateginya lebih kompleks, termasuk dukungan pembiayaan investasi, penetrasi pasar ekspor, kemitraan industri, dan inovasi produk.

Pendekatan "UMKM Naik Kelas" yang kini menjadi agenda nasional bertujuan mendorong mobilitas vertikal dari satu kategori ke kategori di atasnya. Upaya ini membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder: pemerintah, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.

7. Peran Klasifikasi dalam Perumusan Kebijakan

Dengan klasifikasi yang jelas, pemerintah dapat merancang program yang lebih terarah. Contohnya:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan dengan bunga rendah khusus untuk UMKM mikro dan kecil.

b. Program inkubasi bisnis lebih cocok bagi start-up atau UMKM rintisan.

c. Insentif pajak dan sertifikasi halal dapat disesuaikan dengan ukuran dan sektor usaha.

Klasifikasi juga penting dalam evaluasi dampak kebijakan. Tanpa data klasifikasi yang rinci, efektivitas program pemberdayaan UMKM sulit diukur dan diperbaiki secara berkelanjutan.

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI INDONESIA

A. Sejarah Koperasi di Dunia dan Indonesia

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip dasarnya adalah keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Berikut adalah sejarah koperasi di dunia dan Indonesia:

1. Pengantar Sejarah Koperasi

Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang didirikan atas dasar semangat kebersamaan, solidaritas, dan keadilan sosial. Berbeda dengan badan usaha kapitalistik yang mengejar profit semata, koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sejarah koperasi di dunia dan Indonesia bukan hanya mencatat perjalanan institusional sebuah organisasi ekonomi, melainkan juga mencerminkan perjuangan masyarakat bawah untuk memperjuangkan hak-haknya di tengah sistem ekonomi yang seringkali eksploitatif.

Gerakan koperasi lahir sebagai reaksi terhadap ketidakadilan ekonomi yang terjadi pada masa Revolusi Industri di Eropa. Ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja begitu tajam.

BAB 4

REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi

Koperasi, sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional, telah lama menjadi bagian dari perjalanan sosial-ekonomi bangsa Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan sebuah gerakan sosial yang menekankan keadilan, pemerataan, partisipasi aktif anggota, dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka konstitusi, koperasi juga mendapat legitimasi kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dari sinilah koperasi memperoleh tempat istimewa sebagai soko guru perekonomian nasional.

Namun, idealisme koperasi ini tidak akan berjalan tanpa sistem hukum dan regulasi yang mengaturnya secara sistematis, terstruktur, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Peraturan perundang-undangan menjadi fondasi penting yang menjamin legalitas, tata kelola, perlindungan anggota, serta arah pemberdayaan koperasi. Dalam sejarahnya, regulasi koperasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan, penyempurnaan, hingga pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi, menandakan pentingnya sinkronisasi antara semangat koperasi dan desain hukum yang melingkupinya.

1. Landasan Konstitusional dan Filosofis Koperasi

Dalam konteks hukum nasional, koperasi memiliki dasar konstitusional yang kuat. UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha

BAB 5

MANAJEMEN USAHA KOPERASI DAN UMKM

Manajemen usaha yang baik merupakan fondasi penting dalam keberlangsungan koperasi dan UMKM. Di tengah persaingan global dan perubahan pasar yang dinamis, koperasi dan UMKM harus mampu merancang perencanaan bisnis yang tepat, memiliki struktur organisasi dan kepemimpinan yang kuat, menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Bab ini membahas empat komponen penting dalam manajemen usaha koperasi dan UMKM

A. Perencanaan Bisnis

Perencanaan bisnis merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membangun dan mengelola sebuah usaha, termasuk di dalamnya koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks usaha rakyat, perencanaan bisnis seringkali dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai proses yang rumit dan hanya cocok bagi perusahaan besar. Padahal, kenyataannya, perencanaan bisnis yang baik justru menjadi fondasi utama agar koperasi dan UMKM dapat bertahan, berkembang, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Di tengah tantangan globalisasi, perubahan teknologi yang cepat, serta kompetisi yang semakin ketat, keberadaan perencanaan bisnis tidak bisa diabaikan. Sebuah perencanaan bisnis tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi alat strategis untuk pengambilan keputusan,

BAB 6

PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN

A. Sumber Modal Internal dan Eksternal

Permodalan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam dunia usaha, termasuk koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa modal yang memadai dan pengelolaan yang baik, sulit bagi sebuah usaha untuk bertahan, apalagi berkembang secara berkelanjutan. Modal berfungsi sebagai bahan bakar utama dalam menjalankan aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, hingga investasi dan pengembangan usaha. Dalam konteks koperasi dan UMKM, modal dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber internal dan eksternal. Pemahaman mendalam terhadap kedua jenis sumber modal ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan keuangan, strategi ekspansi usaha, serta kemampuan lembaga atau individu dalam mengelola risiko keuangan.

1. Modal Internal

Modal internal merupakan dana yang berasal dari dalam tubuh koperasi atau usaha itu sendiri, baik dari anggota (dalam koperasi) maupun dari pemilik usaha (pada UMKM). Jenis modal ini umumnya tidak memerlukan campur tangan pihak luar, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya.

a. Simpanan Anggota Koperasi

Dalam koperasi, modal internal diperoleh salah satunya dari simpanan anggota yang terdiri dari:

BAB 7

DIGITALISASI DAN INOVASI

A. Transformasi Digital UMKM dan Koperasi

Transformasi digital telah menjadi katalis utama dalam mengubah lanskap perekonomian global, termasuk dalam konteks ekonomi kerakyatan seperti koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah disrupsi teknologi yang berlangsung cepat, koperasi dan UMKM tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional untuk bertahan dan berkembang. Mereka perlu beradaptasi, berinovasi, dan mendigitalisasi model usaha agar tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang terus berubah. Transformasi digital bukan semata-mata penggunaan alat elektronik atau aplikasi daring, melainkan merupakan proses menyeluruh yang melibatkan perubahan dalam pola pikir, sistem kerja, hingga tata kelola organisasi.

1. Pengertian Transformasi Digital

Transformasi digital dapat diartikan sebagai integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis yang menghasilkan perubahan fundamental dalam cara koperasi atau UMKM beroperasi dan memberikan nilai kepada konsumen. Ini bukan sekadar proses teknis, tetapi mencakup aspek strategis dan budaya. Transformasi ini melibatkan perubahan cara berpikir (mindset), proses kerja, struktur organisasi, serta interaksi dengan pasar dan konsumen.

Dalam konteks koperasi dan UMKM, transformasi digital berarti memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses bisnis, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan anggota koperasi, serta menciptakan nilai tambah melalui inovasi produk dan layanan.

BAB 8

PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset paling vital dalam keberhasilan sebuah organisasi, termasuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks pengembangan koperasi dan UMKM, penguatan kualitas SDM bukan hanya soal peningkatan keterampilan teknis semata, melainkan juga menyangkut kemampuan manajerial, pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, dan pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas strategis yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, pemerintah, lembaga pendukung, dan stakeholder lainnya.

1. Pentingnya Pengembangan SDM untuk Koperasi dan UMKM

usaha yang berbasis masyarakat dengan sumber daya yang terbatas, baik modal maupun SDM. Sebagian besar pelaku usaha ini berasal dari kalangan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan formal yang memadai terkait manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Oleh karena itu, tanpa adanya pengembangan SDM yang tepat dan berkelanjutan, koperasi dan UMKM akan sulit berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pengembangan SDM yang baik akan memberikan manfaat antara lain:

a. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha

Pelaku usaha yang memiliki keterampilan dan pengetahuan memadai akan mampu menjalankan usaha dengan lebih efektif

BAB 9

KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

A. Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Komunitas

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk memperkuat daya beli, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan ekonomi komunitas secara bersama-sama. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, koperasi berperan strategis sebagai agen pemberdayaan komunitas yang menggerakkan potensi sumber daya lokal serta mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pemberdayaan komunitas melalui koperasi bukan sekadar upaya meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial, kapasitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Koperasi yang berorientasi pada prinsip demokrasi ekonomi menjamin partisipasi aktif anggota dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola usaha secara kolektif dan adil.

1. Definisi dan Karakteristik Koperasi sebagai Wadah Pemberdayaan

Secara etimologis, koperasi berasal dari kata "*cooperation*" yang berarti kerja sama. Organisasi ini berlandaskan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian keuntungan yang adil. Koperasi mengutamakan kesejahteraan

BAB 10

TANTANGAN DAN STRATEGI MASA DEPAN

A. Tantangan Globalisasi dan Persaingan Pasar

Globalisasi adalah fenomena yang tak terelakkan di era modern saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, batas-batas geografis antara negara menjadi semakin kabur. Barang, jasa, modal, dan informasi dapat bergerak lebih cepat dan lebih bebas melintasi negara dan benua. Globalisasi telah membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi pelaku usaha, khususnya koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka menyerap sebagian besar tenaga kerja, menyediakan produk dan jasa yang sangat beragam, serta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dalam menghadapi arus globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, koperasi dan UMKM harus mampu beradaptasi agar tetap eksis dan berkembang.

1. Dampak Globalisasi terhadap Koperasi dan UMKM

Globalisasi membawa perubahan fundamental dalam pola bisnis dan struktur pasar. Pasar lokal kini tidak lagi eksklusif bagi pelaku usaha domestik. Produk dan jasa dari berbagai negara dengan harga dan kualitas beragam dapat dengan mudah masuk ke pasar Indonesia. Ini menimbulkan tantangan kompetitif yang besar bagi koperasi dan UMKM yang masih mengandalkan cara-cara tradisional dan skala usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Ramadhani, W. P., & Patmaniar, P. (2023). Transformasi digital umkm di indonesia selama pandemi. *Journal Social Society*, 3(2), 140-156.
- Alamin, Z., Lukman, L., Missouri, R., Annafi, N., Sutriawan, S., & Khairunnas, K. (2022). Penguatan daya saing umkm melalui pelatihan keterampilan teknologi di era society 5.0. *Taroo: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 112-126.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56-67.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan Yogyakarta*. STIE YKPN.
- Asnawi, A. (2022). KESIAPAN INDONESIA MEMBANGUN EKONOMI DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Asnawi, A. (2022). KESIAPAN INDONESIA MEMBANGUN EKONOMI DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Bakrie, R. R., Suri, S. A., Sahara, A., & Pratama, V. H. (2024). Pengaruh kreativitas umkm serta kontribusinya di era digitalisasi terhadap perekonomian indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 82-88.

- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan inklusi keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih terinklusif, dan merata di era presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 3(1), 14-31.
- Dalimunthe, M. B. (2017). Keunggulan bersaing melalui orientasi pasar dan inovasi produk. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 3(2), 140-153.
- Devanty, C. P., & Saskara, I. A. N. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan pada koperasi wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(4), 165326.
- Dewi, M. W., Kusuma, I. L., Kristiyanti, L. M. S., Fitria, T. N., & Budiyo, B. (2022). Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Tasikmadu Karanganyar. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 26-31.
- Elfindri, F. (2022). *UMKM dan Ekonomi Kreatif*. Padang: Andalas University Press.
- Fadly, H. D., & Utama, S. (2020). Membangun pemasaran online dan digital branding ditengah pandemi covid-19. *Jurnal Ecoment Global*, 5(2), 213-222.
- Farhan, M. T., Eryanto, H., & Saptono, A. (2022). Pengaruh literasi digital dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha UMKM. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 35-48.
- Fauzi, H. (2020). Pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM sebagai upaya penguatan UMKM Jabar Juara naik kelas. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 247-255.
- Fitriani, R. (2018). Pengembangan SDM koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 6(1), 25-39.
- Godwin, G., Junaedi, S. R. P., Hardini, M., & Purnama, S. (2024). Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 41-47.

- Harto, B., Sumarni, T., Dwijayanti, A., Komalasari, R., & Widyawati, S. (2023). Transformasi bisnis umkm sanfresh melalui digitalisasi bisnis pasca covid 19. *Ikra-Ith Abdimas*, 6(2), 9-15.
- Hill, S., Ionescu-Somers, A., Coduras Martínez, A., Guerrero, M., Menipaz, E., Boutaleb, F., ... & Shay, J. (2023). Global Entrepreneurship Monitor 2022/2023 Global Report: Adapting to a "New Normal".
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., Siska My, A., ... & Purwanda, E. (2023). Ekonomi dan Bisnis Digital.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208-217.
- Judijanto, L. (2024). Perkembangan Startup Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2011-2032.
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15-32.
- Koperasi, K. (2022). Statistik UMKM Indonesia 2022. *Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Kurniyati, Y. (2013). Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok PEW untuk pengembangan ekonomi lokal Kota Yogyakarta. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 91-120.
- Lestari, D. A., Purnamasari, E. D., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM. *JASMARK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran Dan Keuangan*, 1(1), 9-18.
- MARDITA CAHYANTI, A. R. U. N. A. (2021). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA UMKM DI TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANNJUNGPINANG).

- Maulana, I. L. H. A. M. (2022, June). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember [Undergraduate, UIN KH Achmad Siddiq Jember]*.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 14(2).
- Pandega, M. N. Pengelolaan Koperasi Serba Usaha Seroja dalam pemberdayaan di Perumahan Pakujaya Permai.
- Panggiarti, E. K., Sarfiah, S. N., Laut, L. T., & Rumah, P. P. (2023). *Manajemen Strategic Triangle: Kepatuhan Pajak UMKM*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Pradana, L. Y., & Husaein, A. (2023). Peningkatan pelayanan pada koperasi di Kota Jambi melalui digitalisasi koperasi. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 17(1), 106-115.
- Pratama, A. K. Y., Wisdaningrum, O., & Nugrahani, M. P. (2020). Pendampingan dan Penerapan Teknologi Untuk Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro Gula Semut. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 275-284.
- Pristiyanto, P., Harmadji, D. E., Putra, V. P., Awa, A., Heryenzus, H., Supra, D., ... & Mairul, M. (2024). *Manajemen Koperasi dan UMKM: Era Society 5.0*. CV. Gita Lentera.
- Purbasari, R., & Raharja, S. U. J. (2022). Analisis Koperasi Modern Di Era Digital: From Values To Greatness. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3), 295-310.

- Purnawati, E. (2023). Peran Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan UMKM Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*, 2(4), 237-243.
- Puspita, R. S. A., Gurendrawati, E., & Ulupui, I. G. K. A. (2024). Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, Literasi Keuangan, dan Financial Technology Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(1), 48-71.
- Raes, S. (2021). Understanding SME heterogeneity: towards policy relevant typologies for SMEs and entrepreneurship: an OECD Strategy for SMEs and Entrepreneurship.
- Rahmadani, A. P., Agustina, D., Khuzaimah, D., Ningsih, E. C. W., Assafillia, F., Kurniawati, K. D., ... & Jannah, Z. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Dalam Digitalisasi Marketing. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 57-66.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361-374.
- Saba, U. U. (2024). Studi Dampak Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 2(02), 46-51.
- Saefulloh, E., & Asih, D. I. N. (2018). Peran koperasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 1-12.
- Sakitri, W., Maftukhah, I., & Farliana, N. (2025). Optimalisasi Layanan Anggota Koperasi SMK Nurul Barqi Semarang melalui Digitalisasi Tata Kelola Sisa Hasil Usaha. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 73-84.

- Saputra, A. S. (2021). Pengaruh teknologi informasi pada koperasi di era industri 4.0. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 505-510.
- Selasi, D., Agustiani, L. R., & Vidiati, C. (2022). Upaya Mengubah Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Digital Marketing. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1247-1258.
- Sembiring, E. E. (2021). Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Pencatatan Akuntansi, dan Pengelolaan Keuangan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kuliner di Kota Bandung. *Jurnal Difusi*, 4(2), 21-21.
- Sirait, R. M., & SH, M. K. (2025). Manajemen UMKM di Era Digital. *Manajemen UMKM di Era Digital*, 140.
- Sose, A., Tascon, N., & Viemose, A. (2023). Digital economy.
- Suasridewi, D. G., Latupeirissa, J. J. P., Suryawan, I. M. Y., Natashya, R., Mufida, I., & Supriyani, A. (2024). Transformasi Ekonomi Dan Sosial: Dampak Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), 12-27.
- Suseno, B. D., Nuryanto, U. W., Fidziah, F., Silalahi, S., Saefullah, E., Saleh, M., ... & Asfar, A. H. (2023). Manajemen sumber daya manusia.
- Taghizadeh-Hesary, F., Phoumin, H., & Rasoulinezhad, E. (2022). COVID-19 and regional solutions for mitigating the risk of SME finance in selected ASEAN member states. *Economic Analysis and Policy*, 74, 506-525.
- Ulbrych, M. (2020). Progress in achieving sustainable industrial development—the case of the Czech Republic and Poland. *Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe*, 23(4), 109-128
- Wahjono, S. I. (2011). Aktualisasi Budaya Pendalungan untuk Kesenambungan Perusahaan Keluarga dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional. In *National Conference on*

Meningkatkan Ketaahanan Nasional dalam menghadapi Era Globalisasi (Vol. 3, No. 1, pp. 122-132).

Yani, N., & Ernitawati, Y. (2025). Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Pemberian Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dusun Kelapa Sawit Desa Padasugih Brebes (Studi Kasus Toko Zonaku Mbako). *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 3(1), 1-11.

PROFIL PENULIS



Hakim Muttaqim, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev., AFA.

Penulis lahir di Peusangan, Matanglumpang Dua Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh pada 11 Desember 1985 dari Pasangan Bapak Saiful Bahri, S.Pd., dan Ibunda Kartini, S.Pd. Tinggal di desa Matang Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Program Studi *Development Planning and Management*, University Sains Malaysia, Penang Malaysia (2005-2009), Kemudian melanjutkan lagi Studi Strata dua di Program studi Magister Ekonomi Pembangunan (*Economics Development*) (2010-2012) Saat ini , penulis berkarir sebagai dosen pada Homebase Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Peusangan (Umuslim) Kabupaten Bireuen dan menjabat sebagai Wakil Rektor I bidang Akademik Universitas Almuslim.

Email Penulis: hakimmuttaqim@umuslim.ac.id

KOPERASI DAN UMKM

Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia

Buku ini merupakan wujud dedikasi penulis untuk turut serta dalam pengembangan sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia. Dalam dinamika perekonomian global yang terus berubah, peran koperasi dan UMKM semakin krusial, bukan hanya sekadar entitas bisnis, melainkan juga pilar pemberdayaan masyarakat, pencipta lapangan kerja, serta katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan koperasi dan UMKM menjadi motor penggerak yang tak terlihat, namun dampaknya begitu nyata dalam menopang kehidupan jutaan keluarga Indonesia.

Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif yang mengupas tuntas seluk-beluk koperasi dan UMKM. Terdiri dari sepuluh bab mulai dari dasar teori (definisi, prinsip, nilai dasar, dan klasifikasi), sejarah perkembangan, regulasi dan kebijakan pemerintah, hingga manajemen usaha praktis (perencanaan, kepemimpinan, keuangan, evaluasi). Lebih lanjut, buku ini juga mengulas permodalan dan pembiayaan (sumber modal, KUR, lembaga keuangan mikro), digitalisasi dan inovasi (pemanfaatan teknologi, *e-commerce*), serta pemberdayaan dan pelatihan (pengembangan SDM, mentoring). Buku ini juga menyoroti peran Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal dan mengakhiri dengan pembahasan tantangan serta strategi masa depan untuk pengembangan berkelanjutan. Ditulis dengan bahasa yang jelas dan terstruktur, buku ini menawarkan wawasan teoritis dan solusi praktis untuk memajukan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

